



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

2024

Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Blitar
Pemerintah Kota Blitar



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya LKj IP Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Blitar dapat diselesaikan. LKj IP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang disusun berdasarkan Rencana Strategis 2021-2026 dan Rencana Kerja tahun 2024, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj IP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj IP ini baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga LKj IP Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

Blitar, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik,



Mujianto S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197202141992011003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar yang didalamnya terdiri atas sekretariat dan tiga (3) bidang, merupakan unsur dari Pemerintah Kota Blitar yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang di dalamnya memuat Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar mengemban satu misi Pemerintah Kota Blitar, yaitu misi ke-5 (lima) Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam rangka mewujudkan Misi tersebut ditetapkan 1 (satu) Tujuan yaitu Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran Rencana Strategis (RENSTRA), yaitu :

1. Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK;
2. Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik;
3. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah;
4. Meningkatnya Keamanan Informasi.
5. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

LKj IP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sasaran strategis yang tertuang pada Perubahan Renstra 2021-2026, Rencana Kerja 2024, dan telah diperjanjikan pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2024.

Target & Realisasi Kinerja Strategis yang tertuang pada Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,9
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegritasi	98%

Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	91
	Persentase Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100%
Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100
	Indeks IPS	2,7
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	54,26
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,25

Dalam pelaksanaan kinerja tersebut jumlah anggaran belanja sebesar Rp 15.119.202.546,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 14.863.486.070,00

Secara keseluruhan pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar selama tahun anggaran 2024 menunjukkan kinerja yang ***Sangat Berhasil*** dengan ditandai oleh rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar tahun 2024 dengan nilai *101,85% (Seratus Satu Koma Delapan Puluh Lima Persen)* dengan realisasi sebesar Rp 14.863.486.070,00.

Blitar, 28 Februari 2025

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik,



Mujianto S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197202141992011003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Dasar Hukum.....	5
E. Aspek-aspek Strategis.....	8
F. Isu-isu Strategis.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis 2021 – 2026.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran.....	16
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi 2024.....	19
2. Perbandingan Ralisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024.....	38
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Akhir Periode Renstra.....	47
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM).....	48
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome).....	50
1. Menghitung Alokasi Per Tujuan dan/atau Sasaran Pembangunan.....	61
2. Menghitung Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	63
3. Menghitung Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	65
C. Prestasi dan Penghargaan.....	70
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Rencana Tindak Lanjut LKj IP Tahun 2024.....	72
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Table 1 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	14
Table 2 Kriteria Capaian Indikator Kinerja.....	17
Table 3 Pencapaian Kinerja.....	18
Table 4 Pencapaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2024.....	20
Table 5 Pengukuran Realisasi Kinerja Presentase Layanan Publik Online dan Terintegrasi Tahun 2024.....	22
Table 6 Data Jumlah Sistem Informasi Tahun 2024.....	24
Table 7 Pengukuran Realisasi Kinerja Nilai Hasil Monev PPID 2024.....	26
Table 8 Pengukuran Ralisasi Kinerja Indikator Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tahun 2024.....	27
Table 9 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 5 Tahun 2024.....	29
Table 10 Daftar Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Blitar Tahun 2024.....	31
Table 11 Daftar Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Menyusun Evaluasi Pembangunan Daerah di Kota Blitar Tahun 2024.....	32
Table 12 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2024.....	33
Table 13 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Indeks KAMI 2024.....	34
Table 14 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah 2024.....	36
Table 15 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024.....	37
Table 16 Perbandingan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar Tahun 2022 - 2024.....	40
Table 17 Perbandingan Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra.....	47
Table 18 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM).....	49
Table 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung.....	50
Table 20 Alokasi per Tujuan dan/atau Sasaran Pembangunan.....	61
Table 21 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	63
Table 22 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024.....	65
Table 23 Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar.....	4
Gambar 2 Grafik Indeks SPBE Kota Blitar Tahun 2024.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berakhirnya satu tahun anggaran maka sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melaksanakan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. LKj IP merupakan penjelasan ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Rencana Strategis Perubahan 2021-2026, Perubahan Rencana Kerja 2024, dan diperjanjikan pada Perubahan Perjanjian Kinerja 2024

LKj IP Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian tidak terpisahkan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada institusi negara/ pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

LKj IP diperlukan sebagai pengukuran pelaksanaan kinerja institusi negara/ pemerintah sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja yang telah ditetapkan serta di perjanjikan pada Perjanjian Kinerja Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar merupakan proses untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan renstra perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan ke depannya dapat digunakan sebagai bahan

evaluasi peningkatan kinerja instansi sekaligus menjadi tolok ukur dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dijabarkan lagi melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.

Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan. Untuk menjalankan tugas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan tugas pokok dan fungsi:

- a. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi informasi dan komunikasi publik;
- b. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;

- c. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi statistik sektoral di lingkup daerah kota;
- d. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- e. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- f. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- g. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- j. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi

Susunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Umum , dan Keuangan.
- c. Bidang Informasi Komunikasi Publik
- d. Bidang Aplikasi Informatika
- e. Bidang Statistik dan Persandian
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar.



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta memberikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian kinerja strategis dan kinerja utama sesuai indikator yang telah ditetapkan. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu :

1. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
2. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar untuk meningkatkan kinerjanya;

D. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun LKjIP Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PeLKj IPdan Tata Cara Reviu Atas LKj IPInstansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, PeLKj IPdan Tata Cara Reviu atas LKj IPInstansi Pemerintah;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;

26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Walikota Blitar nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

E. Aspek-aspek Strategis

Sebagai unsur penunjang, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar memiliki aspek-aspek strategis yang dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah, diantaranya sebagai berikut:

1. Perumus kebijakan teknis dan pelaksana program urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian

2. Pembina dan Pendamping Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), *Media Partner*, *Influencer* , Relawan TIK, SATU DATA Indonesia, Keterbukaan Informasi Publik, dan keamanan Informasi
3. Agenda Pembangunan dalam RPJMD 2021-2026 untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang bersaing melalui penyediaan infrastruktur komunikasi, melakukan komunikasi publik dan mendeliver substansi terkait digitalisasi melalui sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

F. Isu-isu Strategis

Menjawab permasalahan-permasalahan pada tahun 2024 maka dapat dikemukakan isu-isu strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar sebagai berikut:

1. Pengembangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Blitar menuju terciptanya layanan umum dan administrasi pemerintahan yang sepenuhnya terdigital untuk mewujudkan smart city di Kota Blitar .
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Blitar serta akses layanan internet untuk masyarakat guna mendukung digitalisasi di kota Blitar;
3. Pengembangan pemanfaatan layanan Data center dengan memanfaatkan pusat data nasional untuk meningkatkan keamanan dan integrasi data serta interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Blitar;
4. Pengembangan penyediaan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik;
5. Pembinaan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan

informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ;

6. Pengembangan layanan informasi publik melalui media Pemerintah daerah yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
7. Pengembangan layanan satu data melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik;
8. Pengembangan pelayanan persandian dan keamanan informasi seiring dengan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021 – 2026

Perencanaan adalah suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Perlunya suatu perencanaan yang strategis untuk mencapai tujuan dimana rencana strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam Rencana Strategis ini termuat tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bentuk komitmen organisasi dalam pencapaian kinerja sekaligus sebagai pedoman untuk :

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/ Penetapan Kinerja Tahunan dan Rencana Anggaran;
2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP);
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun ke depan;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada instansi pemerintah.

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar menjalankan Visi Kota Blitar “*Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN : Unggul, Makmur, dan Bermartabat* pada Tahun 2021 – 2026 . Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis,

- Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
 3. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
 4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
 5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar termasuk pada misi ke-5 RPJMD, yaitu “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi”. Menjabarkan misi tersebut, Rencana Strategis (Renstra) mempunyai tujuan yaitu “Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran Rencana Strategis (RENSTRA), yaitu :

1. Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK;
2. Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik;
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial;
4. Meningkatnya Keamanan Informasi.
5. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Adapun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar secara rinci dapat dilihat pada ”Lampiran. I LKjIP 2024, Matriks Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kinerja tujuan, sasaran, dan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk Indikator Tujuan, Kinerja Utama dan Sasaran Strategis sebagai berikut :

Table 1 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	$(\text{Bobot} \times \text{Domain Kebijakan SPBE}) + (\text{Bobot} \times \text{Domain Tata Kelola SPBE}) + (\text{Bobot} \times \text{Layanan SPBE})$	3,9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar
2	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Jumlah Layanan publik online dan terintegrasi $\text{Jumlah layanan publik} \times 100\%$	98%	Bidang Aplikasi Informatika
3	Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	Pemeringkatan monev Keterbukaan informasi publik (Berdasarkan Perki 5 Tahun 2016)	91	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
		Persentase Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti di SP4N LAPOR / jumlah pengaduan yang masuk di SP4N LAPOR * 100%	100%	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%	100%	Bidang Statistik dan Persandian

		pembangunan dan evaluasi pembangunan			
		Indeks Pembangunan Statistik	$\sum \text{ bobot domain } k \times \text{ nilai domain } k$ $k=1$	2,7	Bidang Statistik dan Persandian
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian x 100 %	54,26	Bidang Statistik dan Persandian
6	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A 86,25	Sekretariat

Perjanjian kinerja tahun 2024 dimaksudkan sebagai komitmen dari Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan diberikan anggaran sesuai kebutuhan. Dengan adanya perjanjian kinerja juga sebagai panduan dan arahan bagi OPD untuk memenuhi target yang ditetapkan dan pada akhirnya dapat mencapai target dari rencana strategis OPD.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi baik dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Rencana Strategis unit kerja untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Dalam penyusunannya, laporan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dibuat berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, LKj IP, dan Tata Cara Review atas LKj IP Instansi Pemerintah.

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar diperoleh dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan realisasi yang dicapai. Sedangkan cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dari pengukuran kinerja dapat dilihat gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Adapun dalam

memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Tingkat Realisasi Positif

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Capaian	=	Realisasi	x 100 %
		Target	

2. Tingkat Realisasi Negatif

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Capaian	=	Realisasi – (Realisasi – Target)	x 100 %
		Target	

Dengan kriteria penilaian pada capaian masing – masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Table 2 Kriteria Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3 Pencapaian Kinerja

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,9	4,11	105,3%
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegritasi	98%	98 %	100%
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	91	97,86	107,54%
	Persentase Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100,00%
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan	100	100	100,00%

	evaluasi pembangunan			
	Indeks Pembangunan Statistisk	2,7	2,65	98,15%
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	54,26	59,95	110,49%
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,25	86,43	100,2%

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi 2024

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar beserta target dan capaian realisasinya dirinci seperti hasil analisis sebagai berikut :

a) Indikator Tujuan

Tujuan :

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

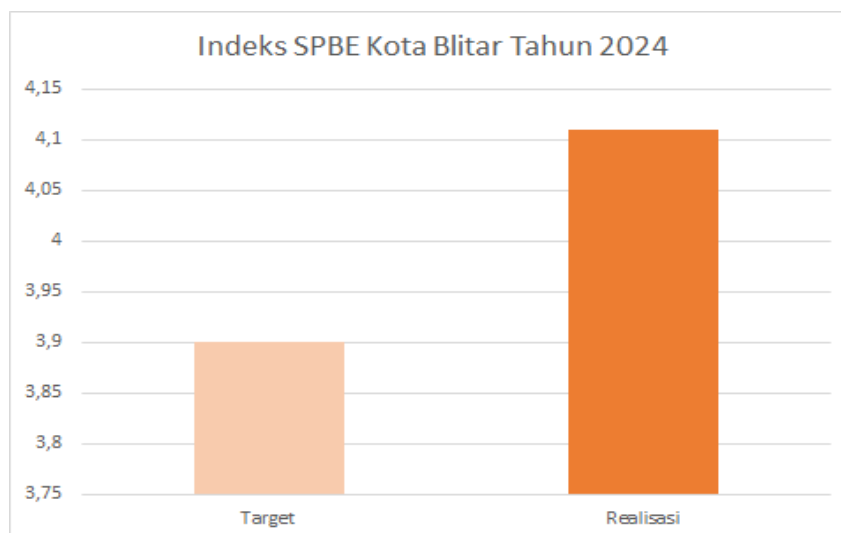
Indikator Tujuan :

Indeks SPBE

Table 4 Pencapaian Kinerja Indeks SPBE Tahun 2024

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,9	4,11	105,3%

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	Kriteria Predikat Indeks SPBE Kota Blitar ditentukan dari 4 (empat) domain yaitu : 1) Kebijakan SPBE, 2) Tata Kelola SPBE, 3) Manajemen SPBE, 4) Layanan SPBE
1	4,2 - 5,0	Memuaskan	
2	3,5 - 4,2	Sangat Baik	
3	2,6 - 3,5	Baik	
4	1,8 - 2,6	Cukup	
5	<1,8	Kurang	



Gambar 2 Grafik Indeks SPBE Kota Blitar Tahun 2024

Target indeks SPBE Kota Blitar tahun 2024 sebesar 3,9 terealisasi sebesar 4,11 atau dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Tahun 2024 merupakan tahun keempat penghitungan nilai indeks SPBE pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar serta RPJMD Kota Blitar tahun 2021 - 2026. Namun, di sisi lain tahun 2024 juga menjadi tahun transisi karena merupakan tahun terakhir kepemimpinan kepala daerah yang lama sebelum berganti kepemimpinan yang baru. Sebagai tim koordinasi SPBE, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dalam mencapai target adalah melaksanakan evaluasi dan asistensi persiapan penilaian mandiri SPBE.

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Kota Blitar. Selain itu, faktor pendukung lainnya yaitu adanya tim koordinasi SPBE yang memiliki peran penting dalam menyusun strategi pencapaian indeks SPBE. Meskipun hasil indeks SPBE adalah SANGAT BAIK, namun masih terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi perolehan nilai yang perlu mendapatkan perhatian yaitu belum adanya penetapan pada dokumen manajemen SPBE yang telah disusun yang disebabkan oleh :

- a. Kurangnya pemahaman bahwa dokumen manajemen SPBE harus disahkan secara resmi
- b. Penetapan dokumen memerlukan proses yang sistematis
- c. Masih ada beberapa dokumen manajemen SPBE yang belum tersusun

Sedangkan rekomendasi yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan nilai indeks SPBE antara lain :

- a. Optimalisasi tim koordinasi SPBE melalui penguatan struktur dan peran tim koordinasi
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi anggota tim koordinasi

SPBE mengenai regulasi dan meningkatkan literasi digital seluruh anggota tim

- c. Melibatkan akademisi dan praktisi dalam perumusan kebijakan dan implementasi SPBE terutama yang belum tersedia

Indikator tujuan pada tahun 2024 telah terealisasi 4,11 dari target sebesar 3,9. Pada indikator ini dapat dikatakan sangat berhasil/ tercapai karena telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 105,3%.

Pada indikator ini dapat dikatakan sangat / tercapai karena telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pada tabel di atas juga menggambarkan kinerja yang dilakukan melalui program-program yang direncanakan dan dilaksanakan secara optimal yaitu melalui terbentuknya Tim Koordinasi SPBE yang melibatkan bagian hukum. Dalam proses pencapaian target masih ditemui permasalahan dan faktor penghambat yakni belum adanya penetapan dokumen Manajemen yang telah disusun. Permasalahan dan hambatan tersebut dapat di tindaklanjuti melalui Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE dan menyusun dokumen manajemen yang tersedia.

b) Indikator Sasaran 2

Tujuan :

Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK

Indikator Tujuan :

Persentase layanan publik online dan terintegritasi

Table 5 Pengukuran Realisasi Kinerja Presentase Layanan Publik Online dan Terintegrasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Jumlah Layanan publik online dan terintegrasi/Jumlah layanan publik x 100 %	98%	98 %	100%

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Indikator sasaran mengenai meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK pada tahun 2024 telah terealisasi 98 % dari target sebesar 98 % Pada indikator ini dapat dikatakan **berhasil** karena telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel di atas juga menggambarkan kinerja yang dilakukan melalui program-program yang direncanakan dan dilaksanakan secara optimal yaitu melalui kesiapan OPD mengampu aplikasi dalam mengintegrasikan aplikasi layanannya sehingga proses integrasi layanan dapat dilakukan. Pada tahun 2024 terdapat pengintegrasian dari dua layanan :

- a. Pertanian, peternakan dan Perkebunan
- b. Perikanan dan kelautan, dengan aplikasi SIPETANI

Sehingga pada tahun 2024 capaian kinerja layanan publik online dan terintegrasi diperoleh hasil 98% (naik 4% dari tahun 2023).

Dalam proses pencapaian target masih ditemui permasalahan dan faktor penghambat yakni dari 43 jenis layanan yang harus terpenuhi sebagian besar dilakukan oleh PD sehingga kurangnya intervensi untuk memenuhi target yang ditetapkan. Dari kondisi tersebut, maka berdampak pada minimnya standarisasi data dan sistem sehingga

menyulitkan interoperabilitas dan menghambat integrasi layanan serta standar keamanan yang diabaikan.

Dalam rangka meminimalkan permasalahan untuk mengurangi hambatan, maka dalam hal pemenuhan layanan publik online dan terintegrasi adanya faktor pendukung dengan mengefektifkan peta rencana SPBE untuk dijadikan panduan strategis dalam implementasi digitalisasi pemerintahan. Dalam peta rencana SPBE tersebut menyajikan arah strategis digitalisasi pemerintahan yang telah disesuaikan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, mengharmonisasikan berbagai sistem dan aplikasi agar saling terhubung, penyediaan panduan teknis dalam pengembangan sistem digital, menjamin keamanan dan perlindungan data juga sebagai alat ukur pencapaian target digitalisasi pemerintahan. Hal tersebut juga dapat ditindaklanjuti dengan adanya tim asistensi untuk menetapkan target sesuai dengan jenis layanan yang harus dipenuhi.

Table 6 Data Jumlah Sistem Informasi Tahun 2024

NO	LAYANAN PUBLIK	TERSEDIA
		2024
1	Kependudukan	1
2	Perpajakan dan Retribusi	1
3	Pendaftaran dan Perijinan	1
4	Bisnis dan Inventasi	1
5	Pengaduan Masyarakat	1
6	Publikasi Info Umum dan Kepemerintahan	1
7	Surat Elektronik	1
8	Sistem Dokumen Elektronik	1
9	Sistem Pendukung Keputusan	1
10	Kolaborasi dan Koordinasi	1
11	Managemen Pelaporan Pemerintah	1
12	Sistem Administrasi DPRD	1
13	Sistem Pemilu Daerah	1
14	Katalog Hukum Peraturan dan Perundangan	1
15	Sistem Informasi dan Managemen Data	1

16	Perencanaan Pembangunan Daerah	1
17	Sistem Perencanaan Proyek	1
18	Pengelolaan dan Monitoring Proyek	1
19	Sistem Evaluasi dan Info Pembangunan	1
20	Sistem Anggaran	1
21	Sistem Kas dan Perbendaharaan	1
22	Sistem Akuntansi Daerah	1
23	Pengadaan PNS	1
24	Sistem Absensi dan Penggajian	1
25	Sistem Penilaian PNS	1
26	Sistem Pendidikan dan Latihan	1
27	Pengelolaan Barang Daerah	1
28	Katalog Barang Daerah	1
29	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1
30	Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1
31	Potensi Daerah	1
32	Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	1
33	Perikanan dan Kelautan	1
34	Pariwisata	1
35	IKM	1
36	Kesehatan	1
37	Pendidikan	1
38	Ketenagakerjaan	1
39	Industri dan Perdagangan	1
40	Jaringan Pengaman Sosial	1
41	Transportasi	1
42	Jalan dan Jembatan	
43	Sarana Umum	1
JUMLAH		43

c) Indikator Sasaran 3

Tujuan :

Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik

Indikator Tujuan :

Nilai Hasil Monev PPID & Persentase Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Table 7 Pengukuran Realisasi Kinerja Nilai Hasil Monev PPID 2024

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Hasil Monev PPID	Pemeringkatan Monev Keterbukaan Informasi Publik (Berdasarkan Perki No 1 Tahun 2022)	91	97,86	107,54%

Indikator kinerja nilai hasil Monev PPID pada tahun 2024 telah terealisasi 97,86% dari target sebesar 91%. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator ini sangat berhasil/tercapai karena telah melampaui target yang ditetapkan. Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator ini adalah:

- Sebagian besar data dukung dari perangkat Daerah untuk pemenuhan SAQ tercukupi
- Sinergi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam pemenuhan data dukung SAQ
- Adanya dukungan dari Pimpinan
- Perbaikan sistem kerja dalam pemenuhan SAQ

Dalam proses pencapaian target masih ditemui permasalahan dan faktor penghambat yakni:

- Perangkat Daerah masih ragu dalam memberikan data pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- Padatnya agenda Pimpinan baik Nasional maupun regional yang bersamaan dengan pelaksanaan wawancara Keterbukaan Informasi Publik

- c. Belum maksimal alokasi anggaran untuk meningkatkan keterbukaan informasi public

Hambatan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan:

- a. Optimalisasi dukungan perangkat daerah dalam memberikan data pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- b. Optimalisasi dukungan pimpinan dalam proses Monev Keterbukaan informasi publik
- c. Himbauan kepada perangkat daerah untuk mengalokasikan anggaran keterbukaan informasi public

d) Indikator Sasaran 3

Tujuan :

Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik

Indikator Tujuan :

Persentase Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

Table 8 Pengukuran Ralisasi Kinerja Indikator Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti di SP4N LAPOR / jumlah pengaduan yang masuk di SP4N LAPOR * 100%	100%	100%	100 %

Indikator kinerja Presentase Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat pada tahun 2024 telah terealisasi 100% dari target yang ditetapkan 100%. Indikator ini dikatakan berhasil/tercapai karena telah

memenuhi target yang ditetapkan. Berikut beberapa factor pendukung tercapainya indikator ini:

- a. Adanya tata laksana pengelolaan pengaduan yang jelas (SOP)
- b. Pelatihan pengembangan kompetensi bagi pejabat penghubung, pejabat pelaksana, dan petugas pelayanan pengaduan
- c. Komitmen kuat para pimpinan dalam menangani aduan yang masuk

Dalam proses pencapaian target juga masih ditemui beberapa permasalahan yang dapat menjadi faktor penghambat dalam pencapaian indikator ini, yakni:

- a. Belum adanya integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik antara pengaduan lokal milik Pemerintah Kota Blitar (ULPIM) dengan Website SP4N LAPOR! sehingga perlu adanya penginputan ulang;
- b. Banyaknya aplikasi dan kanal aduan di perangkat daerah
- c. Keterbatasan jumlah SDM sebagai admin pengelola pengaduan di perangkat daerah;
- d. Adanya rotasi pegawai yang dapat mengganggu kontinuitas penanganan pengaduan di perangkat daerah.
- e. Masih adanya disposisi/pemilahan dari admin pusat yang kurang tepat sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan pengaduan dari masyarakat.

Permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan beberapa upaya berikut:

- a. Penguatan kebijakan kelembagaan (anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas) serta penguatan tata laksana pengelolaan pengaduan instansi pengintegrasian pengaduan ke SP4N LAPOR!
- b. Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah untuk mempercepat tindaklanjut pengaduan oleh Admin dan Pejabat Penghubung
- c. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan kompetensi kepada sumber daya manusia termasuk aparatur dalam

penerapan SP4N LAPOR! supaya penanganan pengaduan dari masyarakat bisa direspon dengan baik.

- d. Memperbanyak informasi/konten publikasi mengenai perkembangan penanganan pengaduan di berbagai media.
- e. Melaksanakan monitoring rutin bulanan kepada Pejabat Pengubung terkait pengelolaan pengaduan dengan menyampaikan rekap laporan penanganan pengaduan SP4N LAPOR! secara periodik tahunan sebagai rekomendasi perubahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

e) Indikator Sasaran 5

Tujuan :

Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator Tujuan :

Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan

Table 9 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Sasaran 5 Tahun 2024

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%`	100%	100%	100 %

Indikator sasaran 5 pada tahun 2024 telah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%. Pada indikator ini dapat dikatakan berhasil/tercapai karena sudah sesuai target yang telah ditetapkan.

Pada aplikasi data telah ditetapkan jenis data yaitu Renja 2024 dan LKJIP 2023 yang akan dipublikasikan dari 30 perangkat daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kota Blitar. Pada tahun 2024 ini telah terkumpul data dari 30 perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Table 10 Daftar Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik
Sektoral dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota
Blitar Tahun 2024

No.	OPD	Perencanaan	
		Data Sektoral	Analisis
1	Sekretariat Daerah		
2	Bappeda		
3	BPKAD		
4	BPKSDM		
5	Sekretariat DPRD		
6	Inspektorat Daerah		
7	Dinas Pendidikan		
8	Dinas Kesehatan		
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
10	Dispera dan KP		
11	Dinas Sosial		
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
13	Dinas P3A, P2 dan KB		
14	Dinas Lingkungan Hidup		
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
16	Dinas Perhubungan		
17	Diskominfotik		
18	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja		
19	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga		
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
24	Satpol PP		
25	Bakesbangpol		
26	BPBD		
27	Rumah Sakit Mardi Waluyo		
28	Kecamatan Sananwetan		
29	Kecamatan Kepanjenkidul		
30	Kecamatan Sukorejo		
Jumlah		100,00%	100,00%

Table 11 Daftar Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Menyusun Evaluasi Pembangunan Daerah di Kota Blitar Tahun 2024

No.	OPD	Evaluasi	
		Data Sektoral	Analisis
1	Sekretariat Daerah		
2	Bappeda		
3	BPKAD		
4	BPKSDM		
5	Sekretariat DPRD		
6	Inspektorat Daerah		
7	Dinas Pendidikan		
8	Dinas Kesehatan		
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
10	Dispera dan KP		
11	Dinas Sosial		
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
13	Dinas P3A, P2 dan KB		
14	Dinas Lingkungan Hidup		
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
16	Dinas Perhubungan		
17	Diskominfotik		
18	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja		
19	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga		
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
24	Satpol PP		
25	Bakesbangpol		
26	BPBD		
27	Rumah Sakit Mardi Waluyo		
28	Kecamatan Sananwetan		
29	Kecamatan Kepanjenkidul		
30	Kecamatan Sukorejo		
Jumlah		100,00%	100,00%

Pada tabel di atas juga menggambarkan kinerja yang dilakukan melalui program-program yang direncanakan dan dilaksanakan secara optimal. Faktor Pendukung indikator ini adalah adanya regulasi berkaitan dengan pengelolaan data statistik sektoral yaitu Perwali Satu Data dan Buku Pedoman Pengelolaan Data Statistik Sektoral Dalam proses pencapaian target masih ditemui permasalahan dan faktor penghambat yakni belum optimalnya pengelolaan data statistik sektoral Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Diantaranya, Pertama belum semua Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan statistik mengajukan rekomendasi statistik. Kedua, penyelenggaraan statistik sektoral belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Permasalahan dan hambatan tersebut dapat di tindaklanjuti melalui pembinaan dan pendampingan pengelolaan data statistik sektoral kepada Perangkat Daerah dengan melibatkan BPS Kota Blitar. Memberikan rekomendasi dan analisis pada perangkat daerah yang menangani perencanaan dan evaluasi. Dengan faktor pendukung sebagai berikut Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Pembina Data (BPS), Koordinator data (Bappeda) serta OPD selaku produsen data dalam penyusunan data statistik sektoral.

f) Indikator Sasaran 6

Tujuan :

Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Indikator Tujuan :

Indeks Pembangunan Statitisk

Table 12 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2024

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Pembangunan Statitisk	$\sum \text{bobot domain } k \times \text{nilaidomain } k$	2,7	2,65	98,15 %

	k=1			
--	-----	--	--	--

Indikator sasaran 5 pada tahun 2024 telah terealisasi 98,15% dari target sebesar 2,7 realisasi 2,65. Pada indikator ini dapat dikatakan sangat berhasil/ tercapai karena walau belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor pendukung diantaranya telah terbentuknya Forum Satu Data Pemerintah Kota Blitar yang terdiri dari Badan Penencanaan dan Pembangunan daerah selaku koordinator data, Badan Pusat Statistik sebagai pembina data, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku walidata dan Perangkat Daerah serta Kelurahan sebagai produsen data. Kerja sama, koordinasi dan kolaborasi yang baik semua elemen dalam forum satu data menjadi modal utama dan pendukung dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Dalam proses pencapaian target masih ditemui permasalahan dan faktor penghambat yakni belum terbangunnya data spasial Pemerintah Kota Blitar . Permasalahan dan hambatan tersebut dapat di tindaklanjuti dengan pembangunan portal data spasial Pemerintah Kota Blitar.

g) Indikator Sasaran 7

Tujuan :

Meningkatnya Keamanan Informasi

Indikator Tujuan :

Indeks KAMI

Table 13 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Indeks KAMI 2024

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian x 100%	54,26	59,95	110,49%

Indikator meningkatnya Keamanan Informasi pada tahun 2024 telah terealisasi 110,49% dari target sebesar 54,26 dengan realisasi 59,95. Pada indikator ini dapat dikatakan sangat / tercapai karena telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Pada tabel di atas juga menggambarkan kinerja yang dilakukan melalui program-program yang direncanakan dan dilaksanakan secara optimal. Dalam proses pencapaian target masih ditemui permasalahan dan faktor penghambat yakni kurang optimalnya pengelolaan keamanan informasi di Perangkat Daerah. Yang dimaksud dengan “Kurang optimalnya pengelolaan keamanan informasi (KAMI) perangkat daerah”, yaitu :

- a. Rendahnya pemahaman pengelola KAMI perangkat daerah dalam mengkategorikan sistem elektronik yang dikelola termasuk kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, penerapan teknologi dan keamanan informasi, perlindungan data pribadi dan keterlibatan penyedia layanan keamanan informasi;
- b. Belum tersedianya dokumen kebijakan, tata kelola, dan prosedur pengelolaan keamanan informasi yang memadai;
- c. Rendahnya minat pengelola KAMI perangkat daerah terhadap peningkatan capaian tingkat keamanan informasi pada perangkat daerah.

Permasalahan dan hambatan tersebut dapat di tindaklanjuti melalui Peningkatan pengetahuan dan keterampilan ASN pengelola keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar tentang pengelolaan keamanan informasi bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan BSSN.

h) Indikator Sasaran 8

Tujuan :

Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah

Indikator Tujuan :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Table 14 Pengukuran Realisasi Kinerja Indikator Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah 2024

Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD Berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	86,25	86,43	100,2%

Indikator sasaran 8 pada tahun 2024 telah terealisasi 86.43 dari target sebesar 86.25 dengan capaian realisasi 100,2%. Indikator ini dapat dikatakan tercapai karena telah melebihi target yang ditetapkan dengan kategori **berhasil**.

Keberhasilan ini ditentukan oleh dukungan dari masing bidang untuk dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang memenuhi standar sesuai dengan pertauran yang telah di tetapkan.

Sedangkan untuk factor penghambat yaitu pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual belum memanfaatkan teknologi informasi serta kurangnya pemahaman dan kepedulian pegawai akan pentingnya pengukuran kinerja serta pemanfaatannya untuk perencanaan kedepannya. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan ataupun peningkatan akuntabilitas, peningkatan efektifitas, efisiensi kinerja dan peningkatan kinerja.

Tindak lanjut perbaikan 2024 :

- a. Berkoordinasi dengan Bag. Organisasi terkait pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai acuan dalam penataan/penyesuaian (Refocusing Organisasi)
- b. Melakukan internalisasi dan penekanan tugas kepada seluruh pegawai untuk lebih aktif dan perhatian terhadap materi dan kondisi data pendukung Laporan Kinerja.
- c. Menyusun rencana kerja memanfaatkan hasil tindak lanjut evaluasi kinerja sebelumnya

Keberhasilan/kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditunjukkan sebagaimana table berikut:

Table 15 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhas il
Meningkatn ya pengembang an Sistem Pemerintah n Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	105,38%	✓			
Meningkatn ya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegritasi	100%	✓			
Meningkatn ya sistem keterbukaan informasi	Nilai Hasil Monev PPID	107,54%	✓			
	Persentase	100%				

publik	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat					
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100%	✓			
	Indeks Pembangunan Statistisk	98,15%				
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	110.49%				
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100.3%				
Rata - rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis		101.85%	SANGAT BERHASIL			

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja dari masing-masing indikator kinerja utama yang telah dijabarkan sampai pada program dan kegiatan, dapat diperoleh gambaran bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada 2024 masuk ke dalam kategori pertama atau “sangat berhasil” dengan nilai rata rata capaian 101,85 % (seratus satu koma delapan puluh lima).

2. Perbandingan Ralisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024

Realisasi Kinerja yang telah dihitung pada tahun 2024 ini, selanjutnya agar diketahui sejauh mana peningkatan kinerja

disetiap indikator dalam memenuhi targetnya maka perlu dibandingkan realisasi antara kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun sebelumnya. Tabel perbandingan realisasi kinerja tersebut dapat dilihat di bawah ini.

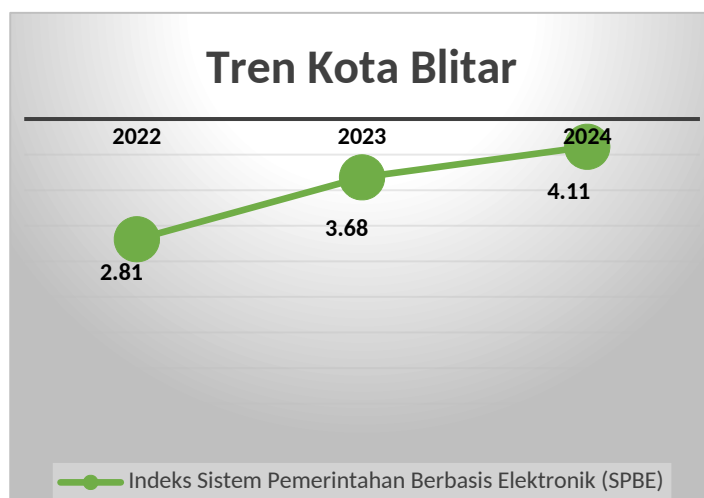
Table 16 Perbandingan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar Tahun 2022 - 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% CAPAIAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2.31	2.81	122%	2.82	3.68	130,50 %	3,9	4,11	105,38%
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	89%	90 %	101,1 %	94%	94%	100%	98	98	100,00%
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	81%	76 %	93,8 %	86	88,69	103,13 %	91	97,86	107,54%
	Persentase Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan							100%	100%	100,00%

	Masyarakat									
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	96%	100%	104,16 %	97%	100%	103,09 %	100	100	100,00%
	Indeks Pembangunan Statistik							2,7	2,65	98,15%
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	38,76	39,4	101,65%	46,51	46,8	100,62 %	54,26	59,95	110,49%
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,28	84,82	101%	85	85,27	100,32 %	86,25	86,43	100,2%

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2024 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**.

Pada tahun 2024, indeks SPBE mencapai 4,11 dengan predikat **Sangat Baik**, mencerminkan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih dan berbasis teknologi. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor utama, seperti kebijakan dan regulasi yang kuat, standarisasi arsitektur SPBE, serta adanya payung hukum yang jelas, termasuk Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2023. Selain itu, dukungan pimpinan melalui kebijakan dan penguatan peran GCIO, ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, kesiapan SDM dengan literasi digital yang baik, serta integrasi layanan dan audit TIK berkala turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas implementasi SPBE.



Grafik 1 Tren Indeks SPBE Kota Blitar Tahun 2022 – 2024

Berdasarkan grafik tren Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diatas, pada tahun 2022 nilai indeks SPBE Kota Blitar sebesar 2,81. Pada tahun 2023 nilai SPBE dapat naik lagi menjadi 3,68. Pada tahun 2024 nilai SPBE naik kembali sebesar 4,11.

Dengan menggunakan metode penilaian mandiri (*self assesment*) yang didasarkan dari hasil evaluasi SPBE tahun 2023 serta

menindaklanjuti rekomendasi tahun 2023, hasil penilaian mandiri tingkat kematangan pada masing - masing indikator SPBE telah diinformasikan kepada Kementerian PANRB melalui lembar kerja dan bukti dukung. Pada tahun 2024 didapat data target dan realisasi penilaian SPBE di Kota Blitar seperti tabel dan grafik di atas.

Berdasarkan tabel dan grafik Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Blitar dapat diketahui bahwa Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Blitar telah terealisasi sebesar 4,11 atau melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 3,9 poin dengan capaian kinerja sebesar 105,38%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berjalan sesuai target yang direncanakan dan mendapatkan predikat nilai sangat baik. Dalam tabel predikat nilai Indeks SPBE yang dirumuskan pemerintah pusat, nilai SPBE Kota Blitar Tahun 2024 sebesar 4,11 masuk dalam kategori sangat baik (3,5 -< 4,2). Hal tersebut juga dapat memberikan gambaran bahwa kinerja Pemerintah Kota Blitar serius dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Ada 4 domain penilaian SPBE yaitu 1. domain Kebijakan internal SPBE, 2. domain tata kelola SPBE, 3. Domain Manajemen SPBE dan 4. Domain Layanan SPBE.

1. Domain 1 terbagi menjadi Aspek 1. kebijakan internal tata kelola SPBE dengan bobot nilai 13% yang terdiri dari 10 indikator penilaian.
2. Domain 2 terbagi menjadi Aspek 2. perencanaan strategis dengan bobot nilai 10% dan terdiri dari 4 indikator penilaian, Aspek 3. teknologi informasi dan komunikasi dengan bobot nilai 10% yang terdiri dari 4 indikator penilaian, serta Aspek 4. Penyelenggaraan SPBE dengan bobot nilai 5% yang terdiri dari 2 indikator penilaian.
3. Domain 3 terbagi menjadi Aspek 5. penerapan manajemen SPBE dengan bobot nilai 12% dan terdiri dari 8 indikator penilaian, Aspek

6. audit TIK dengan bobot nilai 4,5% yang terdiri dari 3 indikator penilaian.
4. Domain 4 terbagi menjadi Aspek 7: Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan bobot nilai 27,5% dan terdiri dari 10 indikator penilaian dan Aspek 8. Layanan Publik berbasis elektronik dengan bobot nilai 18% dan terbagi menjadi 6 indikator penilaian.

Disisi lain untuk penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Blitar akan terus ditingkatkan dan dipertahankan agar lebih baik dari penilaian SPBE Nasional. Meskipun sampai saat ini nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Blitar di atas nilai SPBE Nasional, namun kedepan perlu terus diupayakan langkah – langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan review terhadap Peraturan Walikota tentang pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dan menetapkan Peraturan Walikota baru.
- b. Melaksanakan review masterplan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Blitar. Review masterplan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan aturan penilaian dan indikator SPBE yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Riview masterplan SPBE juga berfungsi untuk menyesuaikan capaian atau target-target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Blitar terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- c. Melaksanakan pendampingan penyusunan Review Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Fungsi dari pendampingan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan transfer ilmu, transfer pengetahuan, dan transfer teknologi untuk memenuhi kriteria dalam penilaian dan indikator yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, termasuk mengetahui dan memahami mekanisme penilaian SPBE sesuai dengan aturan baru yang berlaku.

- d. Menyusun kebijakan tentang pedoman teknis audit TIK yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan Audit TIK di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
- e. Menyusun rencana kerja Tim Koordinasi SPBE dan melaksanakan kegiatan Forum Kolaborasi SPBE yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah serta menyusun rencana kolaborasi penerapan SPBE sesuai dengan Peta Rencana

Sementara itu, misi ke 5 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi, digitalisasi layanan publik memiliki peran yang sangat krusial. Semakin tinggi persentase layanan publik yang online dan terintegrasi, semakin efektif pula upaya pemerintah dalam menciptakan sistem yang transparan, efisien dan akuntabel. Persentase layanan publik online dan terintegrasi dapat dicapai dan didukung dengan adanya perencanaan yang matang dalam layanan publik online dan terintegrasi sehingga langkah-langkah implementasi yang sistematis dan terukur untuk mencapai tujuan layanan publik dapat direncanakan secara matang yang meliputi penuangan dalam peta rencana SPBE, identifikasi dan integrasi sistem, penguatan regulasi dan kebijakan, dan juga koordinasi antar pemangku kepentingan.

Pencapaian Kota Blitar sebagai Kota Informatif yang menduduki peringkat kedua se-Jawa Timur berhasil diraih atas sinergi dan kolaborasi dari Perangkat Daerah. Perbaikan sistem kerja, komitmen pimpinan, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan Kota Blitar sebagai kota informatif. Keterbukaan informasi publik tidak hanya diwujudkan di salah satu aspek saja melainkan dari berbagai aspek sudah lebih diperhatikan seperti, pelayanan, ketersediaan informasi, digitalisasi, hingga sarana prasarana. Capaian ini juga mendukung misi kelima, yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.

Presentase tindak lanjut pengelolaan pengaduan yang mencapai 100% berhasil dicapai karena adanya tata laksana pengelolaan pengaduan yang jelas, pelatihan pengembangan kompetensi bagi pejabat pelaksana

dan petugas pelayanan pengelolaan pengaduan, hingga komitmen kuat para pimpinan dalam menangani aduan yang masuk. Hal ini menjadi bukti komitmen Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar dalam mendukung terwujudnya tata kelola Pemerintahan Kota Blitar yang baik dengan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Wali Kota Blitar sudah mengintegrasikan penyelenggaraan data dan prinsip SDI ke dalam visi dan misi Pemerintah Kota Blitar, yang tertuang pada Perda RPJMD No. 4 Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 tidak tertuang secara *eksplisit* tetapi pada Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi, pada tujuan Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi, sasaran Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Strategi Peningkatan pemanfaatan data statistik daerah pada arah kebijakan telah tercantum mengenai “Peningkatan integrasi satu data dengan aplikasi lainnya, Pemanfaatan data statistik daerah serta Peningkatan ketersediaan data statistik sectoral.

Pada Tahun 2024, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Blitar mencapai sebesar 2,65 atau kategori "Baik", meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 2,52 atau kategori "Cukup", meskipun masih di bawah target yaitu sebesar 2,7 dalam Renja OPD. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi dan sinergi yang baik antara Pembina Data, Wali data, dan Perangkat Daerah, keahlian menulis dalam menjelaskan bukti dukung EPSS, serta administrasi yang tertib. Namun, masih terdapat kendala berupa kekurangan dokumen dalam pelaksanaan kegiatan statistik yang memperlambat pemenuhan bukti dukung EPSS. Secara keseluruhan, peningkatan IPS ini mendukung Sapta Program Prioritas Pemerintah Kota Blitar, khususnya Blitar Cerdas, dalam upaya menciptakan SDM unggul dan kreatif. Pemerintah Kota Blitar perlu melakukan reviu dan evaluasi berkala terhadap penerapan aspek perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani Data dan

Statistik pada Pemerintah Kota Blitar yaitu 1 (satu) orang Statistisi Ahli Pertama. Selain itu, belum Optimalnya Forum SDI di Kota Blitar dalam menginventarisir masalah-masalah yang ada di Kota Blitar.

Koordinasi yang harmonis antara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah berhasil tercapai dalam pembinaan urusan persandian dan keamanan informasi. Kegiatan penerapan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga telah terlaksana dengan baik, melalui edukasi kesadaran keamanan SPBE, penilaian kerentanan, serta sosialisasi, Bimtek, dan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala, yang juga berhasil membentuk jejaring komunikasi di antara stakeholder keamanan SPBE di daerah. Selain itu, terbentuknya Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) BLITARKOTA-CSRT menambah efektivitas dalam penanganan insiden siber di Kota Blitar.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Akhir Periode Renstra

Bila melihat capaian data tahun 2024 seperti diatas, dan dibandingkan dengan rencana target pencapaian di akhir Renstra pada tahun 2024 maka dapat dilihat perbandingannya seperti tabel berikut :

Table 17 Perbandingan Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,45	4,11	119%
Meningkatnya layanan SPBE	Persentase layanan publik	100%	98 %	98%

melalui kebijakan dan tata kelola TIK	online dan terintegritasi			
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	100	97,86	97,86%
	Persentase Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100%	100 %	100%
	Indeks Pembangunan Statistisk	3,1	2,65	85,48%
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	69,77%	59,95%	85,92%
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88,75	86,43	97,38%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Salah satu fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam ikut serta proses pencapaian tujuan Nasional dibidang Komunikasi dan Informatika adalah dengan membandingkan realisasi kinerja daerah

sesuai dengan SPM Nasional, sampai dengan tahun 2024 perbandingan realisasinya adalah sebagai berikut :

Table 18 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Nasional Tahun 2024	Realisasi Daerah Sekitar				Keterangan
				Kab. Tulungagung	Kab. Blitar	Kota Batu	Kota Kediri	
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	4,11	3,12	3,78	3,77	3,57	3,89	Kepmen Nomor 013 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Dari data Laporan Kinerja yang diperoleh terdapat 5 (lima) kinerja yang dapat disandingkan dengan kinerja nasional hasil dari evaluasi yang dilakukan diperoleh Indeks SPBE Nasional Tahun 2024 adalah dengan predikat baik. Sedangkan capaian Kota Blitar masih lebih tinggi dari capaian Nasional yaitu 4,11.

Secara kedekatan geografis, Kota Blitar berdekatan dengan Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu dan Kota Kediri sehingga perbandingan lebih relevan oleh karena dapat mempengaruhi

akses infrastruktur digital dan kesiapan implementasi SPBE. Dengan pertimbangan faktor tersebut, Kota Blitar dapat memperoleh wawasan strategis untuk meningkatkan penerapan SPBE berdasarkan pengalaman daerah sekitar.

Dari data perolehan nilai indeks SPBE tahun 2024, Kota Blitar memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 4,11 dengan predikat **SANGAT BAIK**. Nilai ini menunjukkan peningkatan dari nilai tahun sebelumnya dan melampaui target yang ditetapkan. Meskipun Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu dan Kota Kediri memperoleh predikat SANGAT BAIK, namun secara nilai indeks masih berada di bawah Kota Blitar. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Blitar yang memiliki nilai indeks lebih tinggi menunjukkan bahwa strategi dalam meningkatkan nilai indeks SPBE lebih tepat.

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome)

Dalam melakukan tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar didukung melalui anggaran APBD 2024 sebagai berikut :

1.	Belanja Langsung	:	Rp. 15.119.202.546
----	------------------	---	--------------------

Dari APBD 2024 tersebut, hingga bulan Desember tahun 2024 telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 14.863.486.070 atau sebesar 98,31%.Adapun realisasi belanja langsung tahun 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dapat disampaikan sebagai berikut :

Table 19 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

NO	Uraian	Jumlah (Rp)	
----	--------	----------------	--

		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	BELANJA DAERAH	15.119.202.54 6,00	14.863.486.07 0,00	98,31 %
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.522.216.84 6,00	14.279.904.57 0,00	98,33 %
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.488.349.036 ,00	5.352.501.123 ,00	97,52 %
4	Perencanaan. Panganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.019.150,00	19.765.000,00	98,73 %
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.239.150,00	5.190.000,00	99,06 %
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.880.000,00	9.805.000,00	99,24 %
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.900.000,00	4.770.000,00	97,35 %

8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.184.465.046,00	4.084.622.104,00	97,61 %
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.177.165.046,00	4.077.482.104,00	97,61 %
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.300.000,00	7.140.000,00	97,81 %
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.467.200,00	107.272.000,00	99,82 %
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.290.400,00	31.284.000,00	99,98 %
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	76.176.800,00	75.988.000,00	99,75 %
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.707.320,00	298.723.526,00	99,67 %
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.700.000,00	9.667.000,00	99,66 %
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.012.100,00	12.959.500,00	99,60 %
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.792.220,00	21.975.000,00	96,41 %

18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.525.000,00	58.475.000,00	99,91 %
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.800.000,00	5.799.500,00	99,99 %
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	3.990.000,00	99,75 %
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.878.000,0 0	185.857.526,0 0	99,99 %
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617.898.380,0 0	587.456.638,0 0	95,07 %
23	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	382.509.380,0 0	355.702.510,0 0	92,99 %
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.389.000,0 0	231.754.128,0 0	98,46 %
25	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.791.940,0 0	254.661.855,0 0	98,40 %

26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.267.940,0 0	100.308.355,0 0	97,13 %
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.024.000,00	87.775.700,00	99,72 %
28	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.500.000,00	66.577.800,00	98,63 %
29	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.847.801.500 ,00	2.783.031.827 ,00	97,73 %
30	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.847.801.500 ,00	2.783.031.827 ,00	97,73 %
31	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2.120.000,00	1.936.000,00	91,32 %
32	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	14.027.400,00	13.636.300,00	97,21 %

33	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	6.370.134,00	5.848.500,00	91,81 %
34	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	197.777.240,00	192.467.685,00	97,32 %
35	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	706.194.940,00	683.471.289,00	96,78 %
36	Pelayanan Informasi Publik	577.781.760,00	565.118.028,00	97,81 %
37	Layanan Hubungan Media	988.064.026,00	969.595.350,00	98,13 %
38	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	273.361.400,00	271.044.350,00	99,15 %
39	Manajemen Komunikasi Krisis	3.624.500,00	3.387.500,00	93,46 %
40	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	38.761.800,00	38.170.000,00	98,47 %
41	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat. Media dan Kemitraan Komunitas	39.718.300,00	38.356.825,00	96,57 %

42	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.186.066.310 ,00	6.144.371.620 ,00	99,33 %
43	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.366.228.799 ,00	5.347.956.598 ,00	99,66 %
44	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	27.806.124,00	27.600.000,00	99,26 %
45	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.999.880,00	49.990.000,00	99,98 %
46	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5.288.422.795 ,00	5.270.366.598 ,00	99,66 %
47	Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	819.837.511,0 0	796.415.022,0 0	97,14 %
48	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan	42.983.000,00	41.421.080,00	96,37 %

	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
49	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.180.000,00	3.180.000,00	100,00%
50	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	9.198.600,00	8.898.000,00	96,73%
51	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	143.680.000,00	141.252.200,00	98,31%
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	35.300.000,00	34.300.082,00	97,17%
53	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	12.585.000,00	11.665.000,00	92,69%
54	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	323.928.611,00	320.870.942,00	99,06%
55	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	8.184.000,00	7.987.000,00	97,59%
56	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem	34.891.000,00	34.589.000,00	99,13%

	Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			
57	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	197.004.300,0 0	183.396.718,0 0	93,09 %
58	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	8.903.000,00	8.855.000,00	99,46 %
59	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	340.838.700,0 0	335.834.550,0 0	98,53 %
60	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	340.838.700,0 0	335.834.550,0 0	98,53 %
61	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	340.838.700,0 0	335.834.550,0 0	98,53 %
62	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengolahan. Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	186.845.300,0 0	183.467.550,0 0	98,19 %

63	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	27.837.500,00	27.454.200,00	98,62 %
64	Membangun Metadata Statistik Sektoral	18.627.500,00	18.226.200,00	97,85 %
65	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	88.419.800,00	88.066.700,00	99,60 %
66	Pengembangan Infrastruktur	14.887.300,00	14.510.400,00	97,47 %
67	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	4.221.300,00	4.109.500,00	97,35 %
68	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	256.147.000,00	247.746.950,00	96,72 %
69	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	256.147.000,00	247.746.950,00	96,72 %
70	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	167.672.200,00	159.355.836,00	95,04 %
71	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan	67.658.200,00	66.997.386,00	99,02 %

	Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
72	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64.074.000,00	57.065.550,00	89,06 %
73	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	24.955.000,00	24.379.900,00	97,70 %
74	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.985.000,00	10.913.000,00	99,34 %
75	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	88.474.800,00	88.391.114,00	99,91 %
76	Operasionalisasi Jaring	88.474.800,00	88.391.114,00	99,91

	Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			%
--	---	--	--	---

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar sebesar Rp. 14.863.486.070 atau sebesar 98,31% dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 15.119.202.546.

1. Menghitung Alokasi Per Tujuan dan/atau Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Langsung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dapat diuraikan pada tabel berikut:

Table 20 Alokasi per Tujuan dan/atau Sasaran Pembangunan

Tujuan/Kinerja Utama	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)	(%)
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	9.630.853.510	67,06
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5.488.349.036,00	32,94

Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)	(%)
Meningkatnya layanan SPBE melalui	Persentase layanan publik online dan	6.186.066.310,00	45,51

kebijakan dan tata kelola TIK	terintegritasi		
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	2.847.801.500,00	16,58
	Persentase Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat		
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	340.838.700,00	2,60
	Indeks Pembangunan Statistisk		
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	256.147.000,00	2,37

Dari tabel tersebut bahwa anggaran terbesar dari Dinas Kominfo dan Statistik pada tahun 2024 adalah untuk mendukung sasaran Persentase layanan publik online dan terintegritasi pada OPD dialokasikan Rp. 6.186.066.310,00 atau 45,51% dari pagu anggaran Diskominfo, Nilai Hasil Monev PPID dan Persentase Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dialokasikan Rp. 2.847.801.500,00 atau 16,58% dari pagu anggaran Diskominfo. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan

pembangunan dan evaluasi Pembangunan dan Indeks Pembangunan Statistisk dialokasikan Rp. 340.838.700,00 atau 2,60% dari pagu anggaran Diskominfotik. Indeks KAMI Rp. 256.147.000,00 atau 2,37% dari pagu anggaran Diskominfotik. Hal ini diperuntukkan untuk Meningkatkan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan untuk mencapai Nilai SAKIP Perangkat Daerah dialokasikan Rp. 5.488.349.036,00 atau mencapai 32.94% dari pagu anggaran Diskominfotik.

2. Menghitung Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar dijabarkan dalam tabel berikut:

Table 21 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Tujuan/ Sasaran/ Kinerja Utama	Indikat or Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Tar get	Real isasi	% Cap aian	Alokasi	Realisasi	% Cap aian
Meningkatnya pengembang an Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerin tahan berbasi s elektron ik	3,9	4,11	105, 38%	9.630.853. 510	9.510.984. 947	98,3 1%

Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	98	98	100,00%	6.186.066.310,00	6.144.371.620,00	99,33%
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	91	97,86	107,54%	2.847.801.500,00	2.783.031.827,00	97,73%
	Persentase Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100,00%			
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100%	100%	100,00%	340.838.700,00	335.834.550,00	98,53%

	pembangunan dan evaluasi pembangunan						
	Indeks Pembangunan Statistik	2,7	2,65	98,15%			
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	54,26	59,95	110,49%	256.147.000,00	247.746.950,00	96,72%
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,25	86,43	100,2%	5.488.349.036,00	5.352.501.123,00	97,52%

3. Menghitung Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar ditunjukkan dalam tabel berikut :

Table 22 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

--	--	--	--	--	--

No	Tujuan/Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	105,38 %	98,31%	1,07
2	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	100%	99,33%	1,00
3	Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	107,54 %	97,73%	1,10

		Persentase Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100,00 %		
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100,00 %	98,53%	1,01
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	98,15 %		
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	110,49 %	96,72%	1,14
6	Meningkatnya kinerja Perangkat	Nilai SAKIP Perangkat	100,20 %	97,52%	1.02

	Daerah	Daerah			
--	--------	--------	--	--	--

Berikut beberapa faktor pendukung pelaksanaan efisiensi pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar:

1. Kegiatan penerapan keamanan SPBE (edukasi kesadaran keamanan SPBE dan penilaian kerentanan SPBE) yang berbentuk Sosialisasi, Bimtek, dan/atau Focus Group Discussion (FGD) yang semula Narasumber hadir secara fisik menggunakan metode tatap muka (offline) diubah dengan metode virtual meeting (online) dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (Zoom, Google Meet, dll.);
2. Pengurangan jumlah peserta yang menghadiri kegiatan (Sosialisasi, Bimtek, FGD);
3. Pengurangan volume kegiatan Sosialisasi, Bimtek, FGD;
4. Memaksimalkan negosiasi harga yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen pada saat melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah;

Efisiensi anggaran bukan hanya tentang pemotongan, tetapi juga tentang pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan efektif. Selain itu juga dengan membuat prioritas yang tepat, Optimalisasi Sumber Daya, Monev yang ketat/ cermat, dan perencanaan yang matang.

Tujuan Dinas dengan indikator Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, capaian kinerja 105,38% dengan capaian anggaran sebesar 98,31% maka Tingkat efisiensi mencapai 107,19% Sasaran strategis yang pertama dengan indikator persentase layanan publik online dan terintegrasi, capaian kinerja 100%, dengan capaian anggaran sebesar 99,33%, maka tingkat efisiensi mencapai 100,67% Hal ini

menunjukkan kinerja sasaran strategis pertama efisien, karena capaian kinerja dari persentase layanan publik lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran pengelolaan aplikasi informatika

Untuk sasaran strategis yang kedua dengan indikator Nilai Hasil Monev PPID, capaian kinerja 107,54% , dengan capaian anggaran sebesar 97,73% , maka tingkat efisiensi mencapai 110,04%. Hal ini menunjukkan kinerja sasaran strategis kedua efisien, karena capaian kinerja dari persentase layanan publik lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Untuk sasaran strategis yang ketiga dengan indikator persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan, capaian kinerja 100,00%, dengan capaian anggaran sebesar 98,53%, maka tingkat efisiensi mencapai 101,49%. Hal ini menunjukkan kinerja sasaran strategis ketiga efisien, karena capaian kinerja dari persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran penyelenggaraan statistik sektoral.

Untuk sasaran strategis yang keempat dengan indikator Indeks KAMI, capaian kinerja 110,49%, dengan capaian anggaran sebesar 96,72%, maka tingkat efisiensi mencapai 114,24% Hal ini menunjukkan kinerja sasaran strategis keempat efisien, karena capaian kinerja dari Indeks KAMI lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Untuk sasaran strategis yang kelima dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja 100,20%, dengan capaian anggaran sebesar 97,52%, maka tingkat efisiensi mencapai 102,75% Hal ini menunjukkan kinerja sasaran strategis keempat efisien, karena capaian kinerja dari indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

C. Prestasi dan Penghargaan

Berikut beberapa prestasi dan penghargaan yang diterima oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar selama tahun 2024:

1. Juara 1 Lomba Innovative Government Award (IGA) 2024
2. Juara 1 3rd BEN CARNIVAL TAHUN 2024
3. Juara 3 Lomba Gerak Jalan OPD
4. Juara Harapan 3 Paduan Suara Kategori Instansi/OPD
5. Juara 3 legal Drafting Award
6. Peringkat 2 Implementasi UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik KOTA BLITAR sebagai MENUJU INFORMATIF TINGKAT KABUPATEN/KOTA – JAWA TIMUR
7. Berdasarkan KepMenpan RB Nomor 013 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Pemerintah Kota Blitar mendapatkan predikat “Sangat Baik” dengan Indeks 3,68
8. Juara 2 Program Komunikasi Publik di ajang Jatim Public Relations Award (JPRA) 2024
9. Program Unggulan Radio LPPL Terbaik dalam KPID Award Jawa Timur
10. Perangkat Daerah Terbaik 2 Kinarya Praja 2024
11. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 dengan indeks 4.11 “Sangat Baik”

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sebagai alat evaluasi untuk bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. LKjIP juga disusun sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 maupun Renja 2024 dikategorikan sangat berhasil karena memperoleh capaian rata-rata 101,85% (*seratus satu koma delapan puluh lima persen*).

Nilai tersebut berasal dari indikator sasaran pada Tujuan “Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” dengan perincian sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran 1 :

Persentase layanan publik online dan terintegrasi, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100% (seratus persen) masuk kategori sangat berhasil;

2. Indikator Sasaran 2 :

Nilai hasil monev PPID, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 107,54% (seratus tiga persen) masuk kategori sangat berhasil;

Persentase Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100% (seratus persen) masuk kategori sangat berhasil;

3. Indikator Sasaran 3 :

Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100% (Seratus Persen) masuk kategori sangat

berhasil;

Indeks Pembangunan Statitisk nilai capaian kinerja sasaran sebesar 98,15% (Sembilan Puluh Delapan Koma Lima Belas Persen) masuk kategori sangat berhasil;

4. Indikator Sasaran 4 :

Indeks KAMI, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 110,49% (Seratus Sepuluh Koma Empat Puluh Sembilan Persen) masuk kategori sangat berhasil.

5. Indikator Sasaran 5 :

Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100.2% (Seratus koma dua persen) masuk kategori sangat berhasil.

B. Rencana Tindak Lanjut LKj IP Tahun 2024

Berikut adalah rancana tindak lanjut LKj IP Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024:

Table 23 Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025(perubahan)	Tahun 2026
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE dan menyusun dokumen manajemen yang tersedia.	- Program Aplikasi Informatika - Kegiatan Pengelolaan E-gov di lingkup Pemda Kab/Kota - Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta	√		√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025(perubahan)	Tahun 2026
			rencana SPBE pemerintah daerah			
1	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	● Mengoptimalkan Tim Asistensi Aplikasi untuk menetapkan target sesuai dengan jenis layanan yang harus dipenuhi	- Program Aplikasi Informatika - Kegiatan Pengelolaan E-gov di lingkup Pemda Kab/Kota - Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	√		√
2	Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik	1. Optimalisasi dukungan perangkat daerah dalam memberikan data pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 2. Optimalisasi dukungan pimpinan dalam proses Monev Keterbukaan informasi publik 3. Himbauan kepada	- Program Informasi Komunikasi Publik - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	√	√	

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025(perubahan)	Tahun 2026
		perangkat daerah untuk mengalokasikan anggaran keterbukaan informasi publik 1. Penguatan kebijakan kelembagaan (anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas) serta penguatan tata laksana pengelolaan pengaduan instansi pengintegrasian pengaduan ke SP4N LAPOR! 2. Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah untuk mempercepat tindak lanjut pengaduan oleh Admin dan Pejabat Penghubung 3. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan kompetensi kepada sumber daya manusia termasuk aparatur dalam penerapan SP4N LAPOR! supaya				

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025(perubahan)	Tahun 2026
		penanganan pengaduan dari masyarakat bisa di respon dengan baik. 4. Memperbanyak informasi/konten publikasi mengenai perkembangan penanganan pengaduan di berbagai media. 5. Melaksanakan monitoring rutin bulanan kepada Pejabat Penghubung terkait pengelolaan pengaduan dengan menyampaikan rekap laporan penanganan pengaduan SP4N LAPOR! secara periodik tahunan sebagai rekomendasi perubahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.				
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah	● Pendampingan Pengolahan Data Statistik Sektoral pada Perencanaan pembangunan dan Evaluasi pembangunan	- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan	√	√	

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025(perubahan)	Tahun 2026
		pada perangkat daerah. ● Memberikan rekomendasi dan analisis pada perangkat daerah yang menangani perencanaan dan evaluasi. ● Perlunya pembangunan portal data spasial Pemerintah Kota Blitar	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			
4	Meningkatnya Keamanan Informasi.	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan ASN pengelola keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar tentang pengelolaan keamanan informasi bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan BSSN Memberikan rekomendasi pada perangkat daerah yang menjadi sasaran penilaian Indeks KAMI	- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	√	√	

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025(perubahan)	Tahun 2026
			Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota -			
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	- Berkoordinasi dengan Bag. Organisasi terkait pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai acuan dalam penataan/penyesuaian (Refocusing Organisasi) - Melakukan internalisasi dan penekanan tugas kepada seluruh pegawai untuk lebih aktif dan perhatian terhadap materi dan kondisi data pendukung Laporan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025(perubahan)	Tahun 2026
		Kinerja. - Menyusun rencana kerja memanfaatkan hasil tindak lanjut evaluasi kinerja sebelumnya				

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan pada LKj IP Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2024 , semoga dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar. Semoga dokumen LKjiP ini dapat berguna bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar khususnya sebagai evaluasi untuk perbaikan di masa depan, serta bagi segenap pihak yang berkepentingan.

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR 2021-2026

VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat

MISI : 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		K E T
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET 2024	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	(Bobot x Domain Kebijakan SPBE) + (Bobot x Domain Tata Kelola	2,88	3,9	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Jumlah Layanan publik online dan terintegrasi/ Jumlah layanan publik x 100	81	98%	Penguatan tata kelola SPBE	Penguatan dan optimalisasi infrastruktur jaringan	

Elektronik		SPBE) + (Bobot x Layanan SPBE)			kelola TIK		%				TIK • Peningkatan integrasi aplikasi layanan public	
					Meningkatnya sistem	Nilai Hasil Monev PPID	Pemeringkatan monev Keterbukaan informasi publik (Berdasarkan Perki 5 Tahun 2016)	71	91			
					keterbukaan informasi publik	Persentase Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti di SP4N LAPOR / jumlah pengaduan yang masuk di SP4N		100 %	Peningkatan sistem keterbukaan informasi publik	• Peningkatan kualitas pemerintahan dan layanan publik	

							LAPOR * 100%				• Peningkatan kemudahan akses publik terhadap data dan informasi publik	
					Meningkatnya pemanfaatan data statistik daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%	94,83	100%	Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral	Peningkatan kuantitas dan kualitas Data Sektoral untuk mendukung Satu Data Indonesia	

						pembangunan						
						Indeks IPS	$\sum \text{bobot domain } k \times \text{nilai domain } k, k=1$		2,7			
					Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian x 100 %	20,31	54,26	Peningkatan Keamanan Informasi	Peningkatan peran dan kapasitas BLITAR KOTA-CSIRT	
					Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat		86,25			

							Daerah Kota Blitar					
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--

LAMPIRAN II

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar

SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN	KEGIATAN /	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	98%	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	92,89%	5.700.316.310	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	100 persen	4.965.478.799

							Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	6 domain	27.806.124
							Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	49.999.880
							Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	20 unit	4.887.672.795
							Pengelolaan E-	Presentase ketersediaan	96 persen	734.837.

							Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	aplikasi pemerintahan dan layanan publik		511
							Penatalaksa naan dan Pengawasan e-goverment dalam Penyelengga raan Pemerintah n Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaa n dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokum en	47.383.0 00
							Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah n Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokum en	12.060.0 00

							Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit	9.198.600
							Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	143.680.000
							Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	3 dokumen	35.300.000

							Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	1 PD	12.585.000
							Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 unit	238.928.611
							Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 layanan	8.184.000
							Pengembangan dan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Program Inovasi	2 dokumen	34.891.000

							Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		
							Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	183.724.300
							Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	8.903.000
Meningkatnya sistem	Nilai Hasil Monev	91	PROGRAM INFORMASI DAN	Persentase disemin	90% 80%	2.540.944.000	Pengelolaan Informasi dan	Persentase masyarakat yang menjadi	57%	2.540.944.000

keterbuk aan informasi publik	PPID		KOMUNIKA SI PUBLIK	asi dan layanan informas i publik yang dilaksan akan sesuai dengan strategi komunik asi (STARK OM) dan SOP yang Ditetapk an Persent ase komunit as masyara kat /mitra strategis pemerint ahan daerah			Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	sasaran penyebaran informasi publik		
--	------	--	-----------------------	--	--	--	--	---	--	--

				yang menyeb ar informas i dan kebijakk an pemerint ah daerah						
	Persentase Tingkat Tindak Lanjut Pengad uan Masyar akat	100 %					Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2 dokume n	27.120.0 00
							Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	4 dokume n	14.027.4 00
							Monitoring Informasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	12 dokume n	6.370.13 4

							Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		
							Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	520 dokumen	188.877.240
							Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	11 dokumen	507.826.440
							Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	513.616.760

							Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1100 layanan	921.930.026
							Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	275.361.400
							Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 dokumen	3.624.500
							Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 orang	38.761.800
							Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat,	80 dokumen	43.428.300

							Kemitraan Komunitas	Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan		
Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	96,71 %	340.838.700	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	100%	340.838.700

	Indeks Pemba ngunan Statistik	2,7					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpul an, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 dokume n	211.845. 300
							Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	10 orang	27.837.5 00
							Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	4 dokume n	26.060.0 00
							Peningkatan Kapasitas Kelembagaa	Jumlah Perangkat Daerah yang	4 orang	55.987.3 00

							n Statistik Sektoral	Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		
							Pengembang an Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 unit	14.887.3 00
							Penyelengga raan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 dokume n	4.221.30 0
Meningk atnya Keaman an Informasi	Indeks KAMI	54,2 6%	PROGRAM PENYELEN GGARAAN PERSANDI AN UNTUK PENGAMA NAN INFORMAS I	Persent ase impleme ntasi Persandi an Untuk Pengam anan Informas i Pemerin	64,2 6%	256.28 3.000	Penyelengga raan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/K ota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintsh daerah kab/kota	54,26%	165.203. 000

				tah Daerah Kabupat en/Kota						
							Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dokume n	75.400.0 00
							Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/K	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 laporan	49.608.0 00

							ota			
							Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 laporan	24.965.000
							Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	20 PD	15.230.000
							Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	50,00%	91.080.000

							Kabupaten/Kota			
							Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	40 PD	91.080.000
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84	5.238.213.036	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%	20.139.150
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	5.239.150
							Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	7 laporan	10.000.000

							Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	4.900.00 0
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3.994.46 5.046
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/ Bulan	3.987.16 5.046
							Koordinasi dan	Jumlah Laporan Keuangan	4 laporan	7.300.00

							Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	116.900.800
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	65 paket	24.790.400
							Sosialisasi	Jumlah Orang	68	

							Peraturan Perundang- Undangan	yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	orang	92.110.4 00
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	296.515. 100
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	9.700.00 0
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	13.012.1 00
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	27.000.0 00

							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 paket	51.125.000
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.800.000
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	4.000.000
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	185.878.000

							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	100%	555.389. 000
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Lapora n	320.000. 000
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	235.389. 000
							Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100%	254.803. 940

							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	97.303.9 40
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	90.000.0 00
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 1 Unit	1 unit	67.500.0 00
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	2 unit	

							Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kota Blitar



Mujianto, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720214 199201 1003

LAMPIRAN III PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUJIANTO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar**

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. SANTOSO M.Pd**

Jabatan : **Walikota Blitar**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Walikota Blitar

Drs. SANTOSO M.Pd.

Blitar, 12 Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Blitar

MUJIANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720214 199201 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,90
1	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	98%
2	Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	91
		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100%
		Indeks Pembangunan Statistik	2,7
4	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	54,26%
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,25

No	PROGRAM	Anggaran	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.488.349.036	DAU, DBH dan PBH
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.847.801.500	DBH dan PBH
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	6.186.066.310	DBH dan PBH
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	340.838.700	DBH dan PBH
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	256.147.000	DBH dan PBH
JUMLAH		15.119.202.546	

Walikota Blitar

Drs. SANTOSO M.Pd.

Blitar, 12 Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar

MUJIANTO, S.Sos, M.Si.
Pegawai Utama Muda
NIP. 19720214 199201 1 003

PENGUKURAN KINERJA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR 2024

Tabel Pengukuran Kinerja

Tujuan/Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Formulasi perhitungan	Kinerja			Program	Anggaran		
			Targ et	Realis asi	% Capai an		Alokasi	Realisasi	% Capai an
Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks SPBE		3,9	4,11	105,38%		15.119.202.546,00	14.863.486.070,00	98,31%
Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Jumlah Layanan publik on line dan terintegrasi/Jumlah layanan publik x 100 %	98	98	100,00%	Program Aplikasi Informatika	6.186.066.310,00	6.144.371.620,00	99,33%
Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	Hasil Penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur	91	97,86	107,54%	Program Informasi Komunikasi Publik	2.847.801.500,00	2.783.031.827,00	97,73%

		Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik							
	Presentas e Tindak Lanjut Pengadua n Masyarak at	Jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti di SP4N LAPOR / jumlah pengaduan yang masuk di SP4N LAPOR * 100%	100 %	100%	100,0 0%				
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentas e OPD yang mengguna kan data	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan	100 %	100%	100,0 0%	Program penyelengg araan Statisik	340.838.700, 00	335.834.550, 00	98,53 %

	statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%							
	Indeks Pembangunan Statistik	$\sum \text{ bobot domain } k \times \text{ nilaidomain } k, k=1$	2,7	2,65	98,15 %				
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian x 100 %	54,26	59,95	110,49 %	Program penyelenggaraan Persandian untuk pengamanaan Informasi	256.147.000,00	247.746.950,00	96,72 %
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	86,25	86,43	100,2 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/	5.488.349.036,00	5.352.501.123,00	97,52 %

						Kota			
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--



Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Blitar

Pemerintah Kota Blitar